

DEMI HARGA BERAS TERJANGKAU DPRD DKI Setuju Food Station Dapat PMD Rp1,2 Miliar

JAKARTA (IM) - Komisi Perekonomian DPRD DKI Jakarta menyetujui pemberian penyertaan modal daerah (PMD) Rp1,2 miliar untuk PT Food Station Tjipinang Jaya. PMD tersebut diharapkan mampu memenuhi ketersediaan beras fortifikasi kaya vitamin.

"Ini satu-satunya program yang berisikan langsung dengan stunting. Keterjangkauan harga penting. Kalau programnya ada, tetapi harganya tidak terjangkau, ya, jadi tidak tuntas upaya kita," kata Anggota Komisi B DPRD DKI, Farazandi Fidinansyah dalam keterangan tertulis, Minggu (20/11).

Melalui PMD yang diberikan, kata dia, PT Food Station harus menjamin keterjangkauan harga. Tujuannya agar program tersebut efektif sebagai upaya meningkatkan gizi masyarakat, serta menekan angka stunting pada anak usia dini yang kini mencapai 16,8 persen.

Selain Farazandi, anggota Komisi Perekonomian DPRD DKI lainnya, Nur Afni Sajim, mengatakan beras bervitamin yang dinilai mampu mencegah stunting harus memiliki harga jual ekonomis. Jika harga jualnya mahal, maka dikhawatirkan masyarakat ekonomi kelas bawah tidak mampu mengonsumsinya.

Dampaknya, kata Nur Afni, target awal penyediaan beras tersebut tidak tepat sasaran. "Itu menjadi perhatian. Kita tidak mau, nanti kegiatan itu, ke masyarakat berdampak tidak ekonomis," ujarnya.

Anggota Komisi B, Taufik Zoelkifli turut mendorong PT Food Station agar beras fortifikasi masuk dalam

program pangan murah dengan harapan pemegang kartu Jakarta pintar (KJP) dapat membelinya dengan harga terjangkau.

"Kita memberikan modal untuk menyediakan beras fortifikasi itu, nanti berikutnya jika mau digunakan untuk keperluan masyarakat yang membutuhkan, nanti bisa kita skemakan dengan KJP dan bantuan sosial," kata Taufik.

Sementara itu, menurut Direktur PT Tjipinang Food Station, Pamrihadi Wiraryo, beras fortifikasi merupakan beras premium yang dicampur dengan kernel mengandung zinc, sehingga beras diharap mampu mencegah stunting.

"Sebagaimana kita ketahui salah satu program strategis Pemprov adalah mengurangi stunting. Beras fortifikasi itu diproduksi oleh mitranya FS, di mana beras mengandung kernel zinc yang bisa langsung dikonsumsi masyarakat," kata Pamrihadi.

Untuk penyebarluasan beras fortifikasi, kata dia, PT Tjipinang Food Station akan bekerja sama dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial.

Ia berharap Pemprov DKI bisa memiliki program pendistribusian beras ke masyarakat kurang mampu. Sebab, harga yang dipasang PT Food Station Tjipinang saat ini Rp 16.000 per kilogram.

"Kalau seandainya itu mau dijadikan program oleh Pemprov, Pemprov harus mendesain. Ini baru harga keekonomian yang diperuntukan bagi anak-anak atau bagi warga yang merasa penting mengkonsumsi beras fortifikasi," katanya. ● yan

JELANG PUNCAK MUSIM HUJAN Warga Jakarta Diimbau Bersiap Hadapi Banjir hingga Pohon Tumbang

JAKARTA (IM) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, mengimbau masyarakat mengantisipasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin kencang, tanah longsor hingga pohon tumbang. Kondisi cuaca ekstrem pun diperkirakan masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2022. Sedangkan puncak musim hujan diprediksi akan terjadi pada Januari-Februari 2023.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi beberapa kejadian pohon tumbang. Menurut data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, sebanyak 24 kejadian pohon tumbang terjadi dalam periode 3-9 November 2022. Termasuk di Jakarta Selatan sebanyak 23 kejadian, dan Jakarta Utara sebanyak 1 kejadian.

"Juga sempat terjadi pohon tumbang di halaman Balai Kota akibat hujan disertai angin kencang pada Kamis (10/11) sore," kata Isnawa, Sabtu (19/11).

BPBD DKI kemudian memberikan tiga tips bagi masyarakat dalam menghadapi cuaca ekstrem di Jakarta. Pertama, siapkan perlindungan diri bagi masyarakat yang sering beraktivitas di luar ruangan seperti membawa payung, jaket, topi, ataupun jas

hujan. Kedua, bagi para pejalan kaki dan pengguna kendaraan agar menjauhi area sekitar saluran air atau gorong-gorong terbuka untuk menghindari terjadinya kejadian terpesok saat hujan dan air tergenang. Ketiga, masyarakat agar rutin memantau informasi cuaca yang disampaikan BPBD DKI melalui laman bpbd.jakarta.go.id dan media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan Telegram. Keempat, manfaatkan kanal pengaduan darurat milik Pemprov DKI Jakarta dengan telepon ke nomor 112 dan gunakan aplikasi JAKI untuk melaporkan kejadian banjir atau genangan yang terjadi di sekitar.

"BPBD DKI terus memperkuat koordinasi dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan pohon tumbang dengan instansi terkait," ujar Isnawa.

Instansi yang dimaksud adalah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Gulkarmat, Dinas SDA, PLN, PAM Jaya, dan sebagainya.

"Kami berpesan kepada instansi terkait untuk memantau kondisi pohon-pohon yang kondisinya sudah tua dan rentan tumbang, serta mengecek kondisi baliho-baliho untuk meminimalisir kejadian tumbang atau roboh di kemudian hari," kata Isnawa. ● yan

4 | Metropolis

FOTO: ANT



BISA HEMAT PENGELUARAN 75 PERSEN

Menhub Ajak Masyarakat Beralih Pakai Kendaraan Listrik

Naik motornya keren, enak banget, kencang, bisa ngebut. Idealnya adalah kita harus meninggalkan pakai BBM, bahan bakar fosil itu kita tinggalkan, kata Menhub, Budi Karya Sumadi.

JAKARTA (IM) - Masyarakat perlu segera beralih menggunakan kendaraan listrik mengingat banyak benefit yang didapat. Salah satunya bisa menghemat pengeluaran.

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengatakan, dengan menggunakan kendaraan listrik secara tidak langsung bakal memangkas pengeluaran masyarakat. "Secara keseharian bisa irit 75 persen. Jadi biasanya kalau sehari keluar uang, katakanlah Rp100 ribu, ini (kendaraan listrik) Rp20 ribu cukup," ujar Menhub saat menghadiri talk show bertajuk Electric Vehicle "The Future of Indonesian Transportation" di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (20/11). Selain hemat, kata Budi, kendaraan listrik juga tak kalah keren dengan kendaraan berbahan bakar BBM. Untuk itu, masyarakat perlu secepat mungkin meninggalkan kendaraan berbahan

bakar minyak. Terlebih energi fosil bakal berkurang dari tahun ke tahun.

"Naik motornya keren, enak banget, kencang, bisa ngebut. Idealnya adalah kita harus meninggalkan pakai BBM, bahan bakar fosil itu kita tinggalkan," kata Budi yang datang ke kawasan Bundaran HI menggunakan motor listrik.

Rencananya, kata Menhub, kendaraan bahan bakar listrik akan disubsidi oleh pemerintah. Namun hal itu masih menunggu keputusan dari Presiden Joko Widodo. "Kata Menteri ESDM itu nanti ada subsidi. Tapi itu poinnya cuma 3 tahun," paparnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan, banyak keuntungan yang didapat masyarakat bila mau menggunakan kendaraan listrik. Di antaranya bebas ganjil genap, bebas ganti oli, dan

tidak berisik.

"Kendaraan listrik tidak bersuara kalau malam-malam. Saya sama Pak Menhub jalan malam dengan Kakorlantas, tidak ganggu tetangga, mengecek lapangan enggak berisik," kata Heru.

Bebas Aturan Ganjil Genap

Heru Budi Hartono terus mendorong masyarakat menggunakan kendaraan listrik. Heru menjamin kendaraan listrik terbebas dari aturan ganjil genap. "Kendaraan listrik diberikan kebebasan tidak terkena sistem ganjil genap," ujar Heru saat mengikuti talk show bertajuk Electric Vehicle "The Future of Indonesian Transportation" di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (20/11).

Heru mengatakan, Jakarta adalah role model kendaraan listrik bagi daerah lain pada dua tahun terakhir. Sebab, konversi pergantian kendaraan listrik telah ditetapkan mulai dari kendaraan umum Transjakarta hingga kendaraan dinas Pemprov DKI. "Kendaraan listrik di Jakarta kami lakukan bertahap. Kendaraan umum dan mobil dinas sudah banyak yang kita konversi menggunakan energi listrik," tuturnya.

Menurut Heru, untuk

mendukung dan mempromosikan program ini, Pemprov DKI Jakarta telah menggandeng Menteri ESDM, Menteri Perhubungan, Kor-

lantas Polri, hingga PT PLN. "Kami akan terus sosialisasikan penggunaan kendaraan listrik kepada masyarakat," pungkasnya. ● yan

Nilai UMP DKI 2023 Sedang Dihitung, Mudah-mudahan yang Terbaik

JAKARTA (IM) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono masih belum menentukan nilai upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2023 hingga Minggu (20/11). Sebagai informasi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menentukan bahwa kenaikan UMP 2023 maksimal 10 persen.

Saat ditanya apakah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hendak menaikkan UMP DKI 2023 sebanyak 10 persen, Heru Budi mengaku masih menghitungnya. "Itu (UMP DKI 2023) sedang dihitung," ucap Heru dalam rekaman suara yang diterima, Minggu (20/11).

Ia berharap Pemprov DKI dapat memutuskan nilai UMP DKI 2023 yang terbaik untuk para buruh di Ibu Kota. "Mudah-mudahan (keputusan soal nilai UMP) yang terbaik buat teman-teman pekerja," sebut Heru.

Untuk diketahui, Pemprov DKI sebelumnya disebut bakal menentukan UMP DKI 2023 tanpa mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Hal ini disampaikan unsur buruh yang mengikuti rapat bersama dengan Pemprov DKI pada Jumat (18/11) lalu.

Soal Pemprov DKI yang tak akan menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 itu merupakan hasil rapat buruh-pemerintah setempat. Untuk diketahui, Dewan Pengupahan DKI Jakarta telah menggelar sidang pengupahan perdana terkait nilai UMP DKI 2023 pada Selasa (15/11). Dalam sidang itu, unsur buruh meminta UMP DKI 2023 naik 13 persen.

Sementara itu, unsur pengusaha mengaku merasa keberatan dengan permintaan unsur buruh. Unsur pengusaha sendiri belum mengiskusikan nilai UMP DKI 2023 saat sidang pengupahan perdana itu. ● yan

Pemkab Bekasi Tandatangani Komitmen Bersama Atasi Sampah DAS Citarum

FOTO: DOK.PIM PROKOPIM SETDAKAB BEKASI



Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan (tengah) tampak sedang menandatangani komitmen bersama dalam mendukung Rencana Aksi Pengelolaan Persampahan di Wilayah Daerah Aliran Sungai Citarum Tahun 2022-2025 melalui program ISWMP di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Jumat (18/11).

JAKARTA (IM) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menandatangani komitmen bersama dalam mendukung Rencana Aksi Pengelolaan Persampahan di Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Tahun 2022-2025, melalui Program *Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP)*.

Penandatanganan itu diikuti oleh Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi Jawa Barat, dan 8 Kota/Kabupaten lainnya yang ada di Jawa Barat. Kegiatan itu dilaksanakan di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Jumat (18/11).

Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan menjelaskan, hal itu merupakan dukungan dari pemerintah pusat terkait

pembangunan Tempat Pemusatan Sampah Terpadu (TPST). Menurutnya, di tahun ini pemerintah daerah telah mengusulkan beberapa pembangunan TPST di wilayah Kabupaten Bekasi, dan baru satu lokasi yang dinyatakan lolos, sisanya masih terkendala karena lahan yang harus bersertifikat.

"Tadi telah dilakukan penandatanganan pembangunan TPST dengan syarat lahan harus disediakan oleh Pemda. Dari sekian usulan baru 1 yang lolos karena harus bersertifikat, tapi kami akan berkolaborasi dengan BPN agar tanahnya bersertifikat Pemda," ucapnya dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Jumat (18/11).

Saat ini, pihaknya juga tengah menggarap beberapa program yang dicontohkan oleh Citarum Harum, salah satunya aspek pencemaran lingkungan air dan sungai yang

nantinya akan diimplementasikan di Kabupaten Bekasi sesuai arahan dari Gubernur Jawa Barat.

"Arahan dari Pak Gubernur harus melakukan terobosan di luar text book, ini sedang kita gali untuk mencontoh keberhasilan program Citarum Harum yang banyak melibatkan TNI dan akan kita terapkan di Kabupaten Bekasi," katanya.

Lebih lanjut, dirinya akan mendorong perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bekasi untuk berpartisipasi mewujudkan program yang akan dibangun, melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari perusahaannya.

"Kemarin ada TPS3R CSR dari Hyundai dan akan bertambah. Rencana kami akan mengumpulkan lebih dari 500 perusahaan untuk kita tawarkan program-program pemerintah daerah," ucapnya. ● mdl

KLB Polio, Dinkes DKI Intai Potensi Kasus di 194 RS

JAKARTA (IM) - Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan sejumlah strategi untuk mengantisipasi terjadinya kasus polio di Ibukota. Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinkes DKI Jakarta, Ngabila Salam mengatakan, salah satu langkah yang dilakukan Dinkes DKI adalah melakukan pengecekan terhadap potensi kasus polio maupun lumpuh layu. "Meningkatkan surveilans polio dan kasus lumpuh layu akut anak atau 'acute flaccid paralysis' atau AFP di 194 RS dan seluruh puskesmas serta fasilitas kesehatan di Jakarta," kata Ngabila, Minggu (20/11).

Selain itu, Dinkes DKI juga menengatkan kembali wawasan para tenaga kesehatan di Ibukota tentang penyakit polio maupun lumpuh layu. Surveilans AFP adalah pengamatan gejala yang dilakukan terhadap semua kasus lumpuh layu akut yang memiliki tiga kriteria yakni terjadi pada anak di bawah usia 15 tahun, kelumpuhan bersifat layu dan terjadi secara mendadak, dan kelumpuhan terjadi bukan karena trauma, ruda paksa,

atau kekerasan.

Semua kasus AFP ini akan dicatat untuk meningkatkan sensitivitas kasus polio. Polio adalah penyakit kelumpuhan yang tidak dapat disembuhkan serta disebabkan oleh virus polio. Virus ini dapat ditularkan melalui air atau makanan yang tercemar tinja yang mengandung virus polio.

Untuk itu, kepada masyarakat, Dinkes DKI memberikan sosialisasi promosi kesehatan termasuk menyosialisasikan imunisasi dasar. Warga diharapkan menjaga kebersihan, tidak BAB sembarangan, serta selalu mencuci tangan setelah BAB, BAK, sebelum dan sesudah makan.

"Meningkatkan informasi kesehatan dan promosi kesehatan," lanjutnya.

Sebelumnya, Pemerintah pun sudah menetapkan status kejadian luar biasa (KLB). Penetapan KLB tersebut didasarkan temuan kasus polio tipe 2 di Pidie. Aceh. Dilansir dari detikHealth, anak tujuh tahun diketahui tak pernah divaksin apapun tapi mengalami kelumpuhan. Gejalanya mulai muncul 6 Oktober 2022 dengan keluhan demam dan onset lumpuh dilaporkan tiga hari setelahnya yakni 9 Oktober. ● yan

PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 11

PT Syailendra Capital selaku Manajer Investasi REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 11 ("Manajer Investasi") dengan ini mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 11 ("SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 11").

Berikutan dengan rencana tersebut di atas, dengan ini Manajer Investasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Manajer Investasi dan PT Bank Mega Tbk selaku Bank Kustodian SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 11, telah sepakat melakukan pembubaran SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 11 sebagaimana termaktub dalam Kesepakatan Pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 11 tertanggal 18 November 2022.
- Bahwa seluruh Efek bersifat utang yang menjadi basis nilai proteksi dalam portofolio investasi SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 11 telah jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2022 dan Manajer Investasi telah melakukan pelunasan dan telah menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 11 yang telah diterbitkan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan, sehingga pada tanggal ditandatangani Kesepakatan Pembubaran SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 11 sudah tidak ada lagi Pemegang Unit Penyertaan yang tersisa dalam SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 11.
- Pada tanggal 21 November 2022, Manajer Investasi telah memberitahukan rencana pembubaran SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 11, kepada Otoritas Jasa Keuangan dan telah menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 11 sejak tanggal 21 November 2022.
- Pembubaran dan dimulainya proses likuidasi akan dilakukan dengan ditandatangani akta pembubaran SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 11 di hadapan notaris.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.

SYAILENDRA Jakarta, 21 November 2022

Manajer Investasi
Manajer Investasi selaku Likuidator SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 11
PT Syailendra Capital
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

reksa dana

PENGUMUMAN

PT. RAEMUTI PERUSAHA DYNAMIKA ("Pereroan"), berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, dengan ini mengumumkan bahwa akan dilakukan pengambilalihan ("Akuisisi") saham dalam Pereroan oleh pihak ketiga dan atas Akuisisi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan pemegang saham pengendali pada Pereroan.

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kreditur yang berkeberatan dengan dilaksanakannya pengambilalihan/Akuisisi tersebut, agar dapat mengemukakan atau mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini, ke alamat:

Gedung Cyber Lantai 6,
Jalan Kuningan Barat Nomor 2, Kel. Kuningan Barat,
Kec. Mampang Prapatan,
Provinsi Jakarta Selatan 12710

Demikian Pengumuman ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pereroan Terbatas.

Jakarta, 21 November 2022
Direksi Pereroan